

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMBAYARAN TERMIN ATAS  
PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

**TIFFANY HERTA PUTRI HASMAH  
NIM : 17622114**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2022**

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMBAYARAN TERMIN ATAS  
PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh :

**TIFFANY HERTA PUTRI HASMAH  
NIM : 17622114**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMBAYARAN TERMIN ATAS  
PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan kepada :

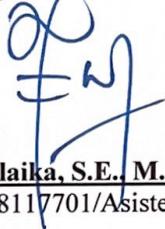
Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : TIFFANY HERTA PUTRI HASMAH  
NIM : 17622114

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



**Nurfitri Zulaika, S.E., M. Ak., Ak., CA.**  
NIDK. 1028117701/Asisten Ahli

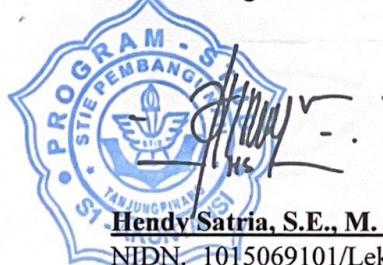
Pembimbing Kedua,



**Budi Zulfachri, S.Si., M. Si.**  
NIDK. 1028067301/Asisten Ahli

Menyetujui

Ketua Program Studi



**Hendy Satria, S.E., M. Ak.**  
NIDN. 1015069101/Lektor

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMBAYARAN TERMIN ATAS  
PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : TIFFANY HERTA PUTRI HASMAH  
NIM : 17622114

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal  
Dua Puluh Tiga Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan  
dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

**Panitia Komisi Ujian**

Ketua,



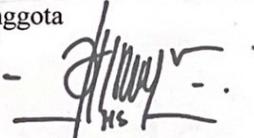
**Nurfitri Zulaika, S.E., M. Ak., Ak., CA.**  
NIDK. 1028117701/Asisten Ahli

Sekretaris,



**Ranti Utami, S.E., M. Si., Ak.**  
NIDN. 1004117701/Lektor

Anggota



**Hendy Satria, S.E., M. Ak.**  
NIDN. 1015069101/Lektor

Tanjungpinang, 23 Agustus 2022  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang,  
Ketua,



**Charly Marlinda, S.E., M. Ak., Ak., CA.**  
NIDN. 1029127801/Lektor

## PERNYATAAN

Nama : Tiffany Herta Putri Hasmah  
NIM : 17622114  
Tahun Angkatan : 2017  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.15  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pembayaran Termin atas Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 26 Agustus 2022

Penyusun



**TIFFANY HERTA PUTRI HASMAH**  
**NIM : 17622114**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan skripsi saya dengan segala kekurangannya.

*Saya persembahkan karya skripsi ini kepada semua orang yang saya sayangi*

### **Orang tua tercinta**

Kepada kedua orang tua saya, Mama dan Ayah, sebagai tanda bakti dan hormat dari saya. Terima kasih yang tak terhingga karena sudah membesarkan, mendidik, mendukung, dan mendoakan yang terbaik untuk saya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Ayah bahagia.

### **Abang dan kakak saya tercinta**

Untuk abang dan kakak saya tercinta, terima kasih banyak atas waktu, dukungan, bantuan, dan inspirasi. Terima kasih telah hadir didunia ini untuk menemani saya disaat saya mengeluh, sedih, dan letih. Skripsi ini saya persembahkan untuk abang dan kakak saya tercinta yang sudah membantu dan memberikan masukan.

### **Sahabat-sahabat saya**

Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Betapa bersyukur saya memiliki kalian dalam hidup saya.

## HALAMAN MOTTO

*Bukan kesulitan yang membuat kita takut*

*tapi ketakutan yang membuat kita sulit*

*- Ali Bin Abi Thalib*

*I know you're sad and tired, you've got nothing left to gift*

*You'll find another life to live, I know you'll get over it*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk menyelesaikan studi program Strata I Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PEMBAYARAN TERMIN ATAS PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M. Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M. Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M. Si., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M. Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M. Ak., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan serta masukan.
7. Bapak Budi Zulfachri, S. Si., M. Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan serta masukan.
8. Seluruh Dosen dan Staf di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang sangat membantu selama berjalannya perkuliahan.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dan Staf yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Mama Raja Masita, Ayah Zulkhairil, dan Adik Ghafeyza Herta yang telah mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
11. Abang dan kakak Handra Afriza, ST., Sugiyanto, S. Sos., Erica Dwi Pangesti, S.E., M. Si., dan Nurizka Afrilasari, S.E., yang telah membantu, mendukung, dan menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Celvi Susanti, Lauren Ramadhani, Viona Meidina, Azri Azizi, Milenitryasa, Ika Fitri, Celsia Anggraini, Raja Henitia, Valentini, dan Haiqal Difa yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

13. Untuk diri saya sendiri yang sudah kuat sampai sejauh dan tidak pernah menyerah dengan keadaan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 26 Agustus 2022  
Penyusun

**TIFFANY HERTA PUTRI HASMAH**  
**NIM. 17622114**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori.....	8
2.1.1 Laporan Keuangan.....	8
2.1.2 Belanja Modal.....	9
2.1.3 Kontrak Konstruksi.....	14
2.1.3.1 Kontrak Konstruksi Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 08.....	16

2.1.3.2 Ketentuan Pembayaran Kontrak Konstruksi.....	17
2.3 Penelitian Terdahulu.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	23
3.2 Jenis Data dan Sumber Data .....	23
3.2.1 Data Primer .....	23
3.2.2 Data Sekunder .....	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.4 Teknik Pengolahan Data.....	25
3.5 Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	28
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	28
4.1.1.1 Sejarah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.....	28
4.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. ....	29
4.1.1.3 Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.....	31
4.1.2 Pelaksanaan Pembayaran Termin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau .....	41
4.1.3 Proses <i>Probit Audit</i> dalam Konstruksi .....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b><i>CURRICULUM VITAE</i></b>	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	4.1 Laporan Hasil <i>Probity Audit</i> .....	54
2	4.2 Tanggapan Wawancara.....	55
3	4.3 Tanggapan Wawancara.....	58

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	1.1 Laporan Hasil <i>Probity Audit</i> .....	4
2	2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
3	4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.....	30
4	4.2 Proses Pembayaran Termin.....	45
5	4.3 Ringkasan Status Pembayaran.....	46
6	4.4 Rekapitulasi Pembayaran Termin Berdasarkan Sertifikat Bulanan Konstruksi.....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: Laporan Hasil <i>Probity Audit</i>
Lampiran 3	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	: Hasil Uji Plagiat
Lampiran 5	: <i>Curriculum Vitae</i>

## ABSTRAK

### ANALISIS PERHITUNGAN PEMBAYARAN TERMIN ATAS PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tiffany Herta Putri Hasmah. 17622114. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Perhitungan Pembayaran Termin atas Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui hasil penelitian dengan teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses pembayaran termin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat adanya kesalahan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada penyedia, hal ini diketahui setelah dilakukan *probity audit* yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan laporan administrasi kemajuan pekerjaan, bahwa pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai. Namun masih ditemukan beberapa item pekerjaan dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak/addendum, hal ini berpotensi terdapat perbedaan antara laporan kemajuan pekerjaan yang disepakati dengan kemajuan fisik dilapangan. Agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk memenuhi aspek administrasi dan keuangan, sebaiknya dilakukan *probity audit* terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran termin kepada penyedia.

Kata Kunci : Pembayaran Termin, Konstruksi, *Probity Audit*

Dosen Pembimbing I : Nurfitri Zulaika, SE., M. Ak., Ak., CA.

Dosen Pembimbing II : Budi Zulfachri, S. Si., M. Si.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF TERMINAL PAYMENT CALCULATIONS FOR CONSTRUCTION WORKS AT THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS, SPACE PLANNING AND LAND RIAU ISLANDS PROVINCE**

Tiffany Herta Putri Hasmah. 17622114. Accounting. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

*The purpose of this study was to determine the calculation of Term Payments for Construction Works at the Department of Public Works, Spatial Planning and Land, Riau Islands Province. The research method used in this study is a qualitative research method. The analytical technique used to find out the results of the research is data processing and analysis techniques carried out in a qualitative descriptive way.*

*Based on the results of the research conducted, the payment process for the term at the Department of Public Works, Spatial Planning and Land of the Riau Islands Province, there are still errors that result in overpayments to the provider, this is known after a probity audit conducted by the Regional Inspectorate of the Riau Islands Province.*

*In accordance with the administrative report on the progress of the work, that the work has been declared complete. However, there are still some work items with work volumes that are not in accordance with those stated in the contract/addendum, this is potentially a difference between the agreed work progress report and the physical progress in the field. In order for the implementation of the work to be carried out in accordance with the applicable laws and regulations, as well as to fulfill administrative and financial aspects, it is recommended that a probity audit be carried out prior to payment of the term to the provider.*

*Keywords : Payment Term, Construction, Probity Audit*

*Advisor I : Nurfitri Zulaika, SE., M. Ak. Ak. CA.*

*Advisor II : Budi Zulfachri, S. Si., M. Si.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan dan berperan selaku pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dilihat apakah pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Desentralisasi yang melahirkan kewenangan besar bagi pemerintah daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mampu mengelola sumber daya publik di daerahnya masing-masing. Desentralisasi pemerintahan diterapkan sebagai solusi penataan kekuasaan di Indonesia yang lebih menjamin distribusi kekuasaan ekonomi dan politik kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi menempatkan pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam proses pembangunan dan pengelolaan daerah. Salah satu fokus pemerintahan yang sangat penting adalah pembangunan infrastruktur hal ini tentunya terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilakukan pada

pemerintah daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengelolaan anggaran, yaitu semakin meningkatnya pengeluaran negara yang diwajibkan (*mandatory spending*). *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Jasa konstruksi adalah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung, misalnya pembangunan gedung-gedung bertingkat maupun tidak bertingkat, gedung apartemen/rusunawa, mall yang tersebar di kota-kota, perumahan hunian serta jembatan, jalan, pabrik, bendung dan bendungan irigasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya, dan banyak lagi bangunan konstruksi yang ada. Setiap tahun, anggaran jasa konstruksi baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta jumlahnya semakin besar. Pembangunan prasarana yang melahirkan sektor jasa konstruksi terus berkembang selepas Indonesia merdeka. Saat ini kita boleh berbangga hati, karena sektor jasa konstruksi mampu melahirkan pelaku usaha yang andal, baik yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkaitan dengan jasa konstruksi, yaitu :

1. Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
2. Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pembangunan Infrastruktur bidang Jalan, Jembatan, Irigasi, Pelaksanaan Tata Ruang, Pertanahan, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur.

Untuk pelaksanaan kontraktual pekerjaan konstruksi, khususnya pada pembangunan infrastruktur bidang jalan dan jembatan, setelah dilakukan penandatanganan kontrak, maka penyedia akan mengajukan permohonan pembayaran uang muka, dan pembayaran prestasi pekerjaan/termin. Pada saat pekerjaan telah mencapai progres 100%, maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang selanjutnya dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) sebelum berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak.

Pelaksanaan *Probity Audit* paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Frangky-Simpang BNI Kota Batam (Lanjutan) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.03.01.15.26.5.2, tanggal 26 Desember 2018 dengan pagu anggaran Rp 3.920.000.000,00. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Multi Sindo Internasional dengan nilai kontrak Rp 3.819.804.855,81.

Pada saat dilakukan *probity audit* oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau maka akan dilakukan pemeriksaan administrasi keuangan, administrasi proyek, dan pengukuran pekerjaan di lapangan secara menyeluruh sesuai dengan daftar kuantitas dan harga yang tercantum di dalam kontrak/addendum, namun setelah dilakukan pemeriksaan terdapat selisih perhitungan yang berakibat kelebihan pembayaran kepada penyedia dan perbedaan perhitungan terhadap denda keterlambatan pekerjaan. Hal ini berdasarkan dari Laporan Hasil *Probity Audit* yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor LAP.04/PA/ITPROV-KEPRI/2019 dimana hasil temuan menyebutkan bahwa realisasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 5.186.124,81, dengan perincian lampiran Laporan Hasil *Probity Audit* sebagai berikut :

### Gambar 1.1

#### Laporan Hasil *Probity Audit*

Nomor LHP dan Tanggal LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi
LAP.04/PA/ITPROV-KEPRI/2019	realisasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan	Kelalaian Pejabat Berwenang	1. Kepada Pejabat Pembuat Komiten apabila belum pengajuan termin

Nomor LHP dan Tanggal LHP	Temuan	Penyebab	Rekomendasi
	kontrak dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 5.186.124,81		<p>selanjutnya senilai Rp 5.704.737,29 (Sudah Termasuk PPN). Namun apabila sudah dilakukan pengajuan pembayaran termin terakhir, agar menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen untuk memerintahkan kepada pihak penyedia untuk menyetorkan kembali ke kas daerah sejumlah kekurangan volume senilai Rp 5.186.124,81 (Tidak Termasuk PPN).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Konsultan Pengawas supaya lebih cermat dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan.</li> <li>3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Direksi Pekerjaan supaya melaksanakan kewajibannya dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan Kontraktor Pelaksana.</li> </ol>

Sumber : Laporan Hasil *Probity Audit* Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil suatu judul penelitian Analisis Perhitungan Pembayaran Termin atas Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan fenomena permasalahan penelitian maka dapat diberikan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perhitungan Pembayaran Termin atas Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, Belanja Modal Jaringan Jalan terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Frangky – Simpang BNI Kota Batam (Lanjutan) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Perhitungan Pembayaran Termin atas Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang Perhitungan Pembayaran Termin atas Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk masyarakat dalam mengetahui Perhitungan Pembayaran Termin atas

Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan teori yang berupa penjabaran teori-teori yang mendukung variabel penelitian, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengumpulan data lapangan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan organisasi pemerintah merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2018). Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat di pertanggungjawabkan

sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Menurut (IAI, 2015) “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan menurut (IAI, 2015) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Menurut (Suwardjono, 2014) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Sedangkan menurut (Warren, S. Carl, James M Reeve, 2015) “Laporan keuangan adalah setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan maka disiapkan bagi pemakai. Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi demikian disebut laporan keuangan.

### **2.1.2 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Abdul Halim, 2012). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tidak berwujud (Siregar et al., 2013). Menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal melalui proses lelang atau tender, sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Ketentuan hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, yang mengatur tentang Akuntansi Aset Tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal terdiri dari 5 kategori utama (RI, 2010), yaitu :

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat,

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli,

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja modal tanah terdiri atas belanja modal pengadaan tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanah kebun campuran, tanah hutan, tanah kolam ikan, tanah danau, tanah rawa, tanah tandus, tanah padang rumput, tanah untuk bangunan gedung, tanah pertambangan, dan tanah untuk bangunan bukan gedung. Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung meliputi pengeluaran untuk pengadaan tanah untuk bangunan perumahan, bangunan perdagangan/perusahaan, bangunan industri, bangunan tempat kerja, tanah kosong, bangunan peternakan, bangunan pengairan, serta bangunan jalan dan jembatan. Sedangkan belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung merupakan pengeluaran untuk pengadaan tanah lapangan olah raga, parkir, penimbungan barang, pemancar, pengujian/pengolahan, lapangan terbang, bangunan jalan, bangunan air, bangunan instalasi, bangunan jaringan, bangunan olah raga, dan bangunan tempat ibadah.

Belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor merupakan pengeluaran untuk pengadaan kendaraan bermotor dinas, penumpang, angkutan barang khusus roda dua dan roda tiga. Belanja modal pengadaan alat angkut apung bermotor merupakan pengeluaran untuk pengadaan alat angkut apung bermotor barang, penumpang, dan khusus. Belanja modal pengadaan alat kantor merupakan pengeluaran untuk pengadaan mesin ketik, mesin hitung, penggandaan dan penyimpanan perlengkapan. Belanja modal pengadaan alat rumah tangga merupakan pengeluaran untuk meuble air, alat pengukur waktu, pembersih,

pendingin, dapur, rumah tangga, dan pemadam kebakaran. Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/pejabat merupakan pengeluaran untuk pengadaan meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, kursi tamu, serta lemari, dan arsip kerja. Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monumen dan rambu-rambu. Gedung tempat kerja meliputi gedung kantor, gudang, bengkel, instalasi, laboratorium, tempat ibadah, pertemuan, pendidikan, olahraga, pertokoan, pasar, pos jaga, pabrik, stasiun bus, kandang hewan, perpustakaan, terminal, pelabuhan, bandara, dan lembaga permasyarakatan. Gedung tempat tinggal meliputi rumah negara, wisma, mess, asrama, hotel, motel dan rumah susun. Bangunan bersejarah meliputi istana peringatan, rumah adat, rumah peninggalan sejarah, makam bersejarah dan tempat ibadah bersejarah. Rambu-rambu meliputi rambu suar, *runway*, *approach light*, *signal*, dan *flood light*.

Belanja modal pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran untuk pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan meliputi jalan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta, dan landasan pacu. Jembatan meliputi jembatan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta api, landasan pacu, dan penyeberangan. Bangunan irigasi meliputi bangunan air irigasi, air pasang surut, dan air rawa. Jaringan meliputi penanganan sungai dan penanggulangan bencana alam, pengembangan sumber air dan air tanah, air bersih, air kotor, bangunan air, instalasi air minum bersih, instalasi air kotor, pengolahan

sampah non organik, pengolahan bahan bangunan, instalasi listrik, gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas. Belanja modal aset tetap lainnya merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya meliputi buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olah raga lainnya, hewan dan tanaman. Terbitan meliputi terbitan berkala dan buku laporan. Barang-barang perpustakaan meliputi peta, manuskrip, musik, karya grafika, *microform*, rekaman suara, berkas komputer, rekaman video dan *tarsclalt*. Barang bercorak kebudayaan meliputi pahatan, lukisan, alat kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan, market dan foto dokumen, benda-benda bersejarah, dan barang kerajinan. Hewan meliputi binatang ternak, unggas, melata, ikan, hewan kebun binatang, dan hewan pengamanan. Sedangkan tanaman meliputi tanaman perkebunan, hortikultura, kehutanan, hias, serta obat dan kosmetika.

### **2.1.3 Kontrak Konstruksi**

Kontrak konstruksi sebagaimana kontrak pada umumnya, menimbulkan hubungan hukum maupun akibat hukum antara para pihak yang membuat perjanjian. Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang Jasa Konstruksi, kontrak konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam hal ini kontrak harus memiliki dua aspek utama yaitu “saling menyetujui” dan “ada penawaran serta penerimaan” (Sutadi, 2005). Penyedia jasa berjanji untuk memberikan jasa dan menyediakan material untuk membangun

proyek bagi pengguna jasa. Pengguna jasa berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan jasa dan material yang telah digunakan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi : (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur; (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset; (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Indonesia, 2012) kontrak konstruksi adalah “Suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan teknologi dan fungsi atau tujuan penggunaan pokok”. Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti : jembatan, bangunan, dan jalan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan dari

pembangunan pokok. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 tentang Kontrak Konstruksi meliputi :

1. Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, misalnya : pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek; dan
2. Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

#### **2.1.3.1 Kontrak Konstruksi Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08**

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

Berdasarkan Pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 diketahui tujuan standar akuntansi kontrak konstruksi memberikan panduan untuk :

1. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
2. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca; dan
3. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 diketahui Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

#### **2.1.3.2 Ketentuan Pembayaran Kontrak Konstruksi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ketentuan Pembayaran Kontrak Konstruksi dilakukan dengan ketentuan :

1. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda;

2. Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan; dan
3. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2021) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :

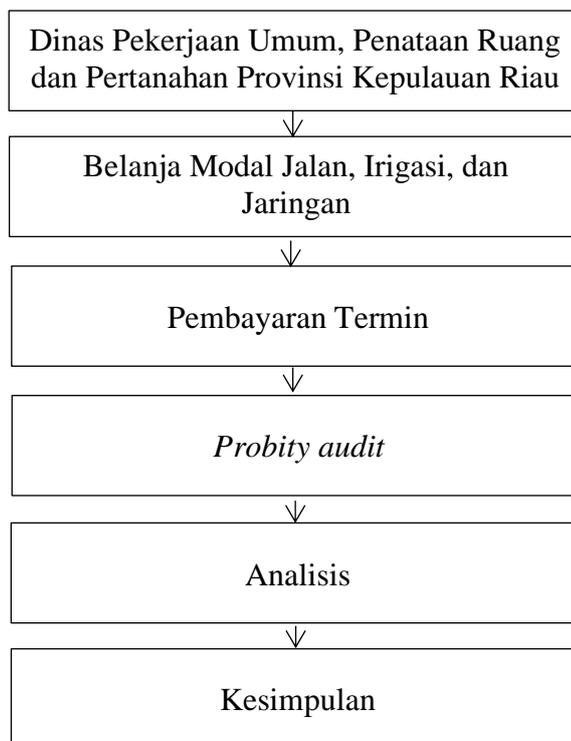
1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pada buku Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2021) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan. Klaim dapat timbul, misalkan dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian, berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Konsep yang disesuaikan dengan penelitian, 2021.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini merupakan jurnal yang relevan dengan variabel penelitian sebagai berikut :

1. Renaldo Andrew Jusuf. 2021. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”. Analisis Pelaksanaan *Probit Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. permasalahan yang timbul saat tahapan pelaksanaan dan pelaporan *probit audit* sebagai berikut : (1) masih kurangnya Auditor/P2UPD yang berkompeten dalam

pengadaan barang/jasa dan audit konstruksi; (2) kurangnya waktu pemeriksaan sehingga pemeriksaan fisik pekerjaan tidak bisa dilakukan secara optimal atau bahkan tidak dilakukan sama sekali untuk pemeriksaan fisik pekerjaan di luar Kota Manado tidak dilakukan fisik pekerjaan karena tidak terdapat anggaran pemeriksaan luar kota; (3) perbandingan harga untuk mengetahui kewajaran harga satuan yang ada di RAB tidak dilakukan karena kurangnya waktu pemeriksaan; (4) laporan *probity audit* tidak diserahkan saat hari terakhir pemeriksaan, tetapi baru dibuat setelah masa pemeriksaan berakhir; dan (5) tindak lanjut temuan *probity audit* belum dilaksanakan.

2. Nurul Listanto. *Jurnal Konstruksia / Volume 10 Nomer 1 / Desember 2018. Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Kontraktor Kepada Subkontraktor Pada Proyek Gedung Bertingkat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab keterlambatan pembayaran dari pihak *owner* yang paling dominan sebagai berikut : (1) Adanya perselisihan yang belum selesai; (2) Faktor penyebab keterlambatan pembayaran dari pihak kontraktor yang paling dominan adalah ketersediaan modal kontraktor kurang; dan (3) Faktor penyebab keterlambatan pembayaran dari pihak subkontraktor yang paling dominan adalah kontraktor menemukan hasil kerja subkontraktor yang cacat.
3. Nur Aini Utami. 2017. *Jurnal Auditor, Volume X, No. 19. Analisis Penerapan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Analisis dilakukan terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan *probity audit* selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak

dilakukan *probity audit* dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan *probity audit* yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian ini adalah *probity audit* diperlukan dan *probity audit* terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. *Probity audit* yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-362/K/D4/2012.

4. Agu NN. 2022. *An Assessment of contract auditing techniques of construction projects in Anambra state, Nigeria*. Audit konstruksi adalah akuntansi forensik objektif, keuangan, kinerja dan latihan teknis, yang dilakukan pada proyek konstruksi yang bertujuan untuk memastikan dan mengevaluasi bukti asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi, profesional pada proyek dan pemangku kepentingannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi teknik audit kontrak proyek konstruksi di negara bagian Anambra, Nigeria. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriptif; tinjauan literatur yang relevan di masa lalu dilakukan. Populasi penelitian adalah delapan puluh sembilan (89), sedangkan tujuh puluh tiga (73) kuesioner dibagikan kepada responden untuk penelitian ini. Enam puluh (60) kuesioner telah diisi dan dikembalikan. Data dikumpulkan dengan bantuan kuesioner terstruktur yang diberikan pada profesional konstruksi. Data yang dihasilkan dianalisis lebih lanjut menggunakan alat

statistik deskriptif seperti persentase, frekuensi dan nilai indeks rata-rata atau *Mean Importance Score (MIS)*. Studi ini mengidentifikasi mengasuransikan akuntabilitas dan kejujuran, memeriksa akuntabilitas dan kejujuran, dan untuk memastikan kepatuhan semua praktik dan prosedur sebagai manfaat penerapannya dalam proyek konstruksi. Hal ini juga mengidentifikasi kurangnya dukungan pemerintah dan legislatif, kurangnya kesadaran publik, dan penerimaan kelembagaan sebagai daerah yang muncul yang mempengaruhi audit kontrak konstruksi dan praktiknya.

5. Chew Ng, 2011. *The Practice Of Probity Audits In One Australian Jurisdiction. Managerial Auditing Journal*, Vol. 16 No. 2, pp. 69-75 "*Probity Audit*" adalah jenis audit baru yang mendapatkan popularitas di sektor publik Australia. *Probity Audit* mengacu pada tinjauan independen terhadap privatisasi pemerintah, mengontrakkan proyek (pengadaan pemerintah), dan ekspresi kepentingan untuk memastikan apakah prosedur yang diikuti konsisten dengan peraturan, pedoman, dan prinsip praktik terbaik keterbukaan dan transparansi yang sesuai. Survei departemen pemerintah di satu yurisdiksi Australia tentang praktik mereka terkait dengan audit kejujuran. Menyimpulkan bahwa, sementara banyak yang telah melakukan audit kejujuran, konsep tersebut tidak sepenuhnya dipahami. Selanjutnya, sebagian besar audit yang dilakukan adalah "*real-time*" dan dilakukan oleh pihak di luar sektor publik. Disimpulkan dengan menyarankan area untuk penelitian lebih lanjut.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2018) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi. Sehingga dapat diketahui penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang didapatkan berkenaan tentang Perhitungan Pembayaran Termin atas Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

#### **3.2 Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **3.2.1 Data Primer**

Menurut Sanusi (2014) data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan informan terkait Perhitungan Pembayaran Termin atas Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang selalu berhubungan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang berperan sebagai *Quality Assurance* untuk menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2.2 Data Sekunder**

Menurut Sanusi (2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi dan tidak mengalami perubahan. Jenis data sekunder ini seperti struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang terkait dengan perhitungan pembayaran termin serta hasil *probit audit* dari temuan pembayaran termin pekerjaan konstruksi.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data berguna untuk mendapatkan data yang akurat tentang objek penelitian. Menurut Sugiyono (2013) pengumpulan data adalah mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku pedoman beberapa literatur yang ada hubungannya dengan penulisan ini. (Sunyoto, 2013)

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara dengan pihak yang berwenang untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat dan lengkap; dan
- b. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan serta arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, seperti catatan perusahaan. (Sugiyono, 2011)

### **3.4 Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara tepat dan jelas dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Adapun langkah-langkah analisa data Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2012) yang dilakukan adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih

yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

## 2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data dimaksud agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

## 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis, dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, data yang diperoleh dihimpun menurut jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilaksanakan pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengemukakan masalah apa adanya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan akurasi data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang disarankan oleh data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, W., Nugroho, A. S., & Sugiyarto, S. (2016). *Analisis Perbandingan Resiko Kontrak Lumpsum Dan Unit Price Dengan Metode Ahp. Matriks Teknik Sipil*, 4(2).
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
- Indonesia, I. A. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*. United State of America: Wiley.
- KSAP, K. S. A. P. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, (71), 160–173.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik : Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi penelitian. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- RI, P. P. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. , (2010).
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, B., Suropto, B., Hapsoro, D., Lo, E. W., Herowati, E., Kusumasari, L., & Nurofik. (2013). *Akuntansi Biaya - Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. In

*BPFE- Yogyakarta.*

Warren, S. Carl, James M Reeve, J. E. D. (2015). *Accounting Indonesia Adaption, Pengantar Akuntansi, Adaptasi Indonesia, terjemahan: Novrys Suhardianto dan Devi S. Kalanjati.* Jakarta: Salemba Empat.

# ***CURRICULUM VITAE***



Nama : Tiffany Herta Putri Hasmah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 05 Juni 1999  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Umur : 23 Tahun  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Perumahan Lembah Asri Blok B3 Nomor 23  
Jl. Handjoyo Putro  
Agama : Islam  
E-mail : Tiffanyhertaputri@gmail.com  
No. Telp/WA : 0812-777-8984/0857-6009-2989  
Pendidikan :  
1. SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur  
2. SMP Negeri 7 Tanjungpinang  
3. SMK Negeri 1 Tanjungpinang  
4. STIE Pembangunan Tanjungpinang